

BAB III

UPAYA DAYA SAING UMKM LOKAL TERHADAP *E-PROCUREMENT* DI PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2015

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil olah data berupa data jumlah pemenang pelelangan tahun 2011-2015 dari jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi badan usaha maupun jasa lainnya dan juga data sekunder maupun hasil wawancara pada penelitian ini, bahwa adapun beberapa informasi yang ditemukan diantaranya adalah :

- a. Setiap tahun tingkat signifikansi UMKM di Provinsi Riau sudah dikatakan cukup baik bahwasannya setiap tahun mengalami peningkatan 2,9% secara keseluruhan. Meskipun tidak semua dari UMKM tersebut berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa di Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan ekonomi.
- b. Asosiasi UMKM Provinsi Riau telah menyediakan wadah bagi UMKM di Provinsi Riau agar dapat berpartisipasi dan berbagi ilmu supaya meningkatkan daya saing baik dari UMKM itu sendiri maupun bagi Pemerintah Provinsi maupun Daerah dengan diadakannya Klinik UMKM dan Klinik UKM.
- c. LPSE Provinsi Riau akan merilis *e-catalog* agar mempermudah pelaku usaha khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini agar harga jual yang mereka miliki masuk dalam sistem *e-catalog*

sehingga perusahaan lokal tidak kesulitan untuk mendaftar di LKPP. Maka ini akan memunculkan daya saing yang ranahnya akan lebih maju.

- d. Berdasarkan temuan dari Asosiasi UMKM di Provinsi Riau adanya kesulitan berada pada akses biaya yang tentunya berkaitan dengan Bank pemberi KUR berdasarkan apa yang dilakukan oleh UMKM. Pada tahun 2011 baru dioptimalkan penyaluran KUR di Riau karena UMKM pada tahun sebelumnya merasa kesulitan dalam mengelola usaha yang dimiliki.
- e. Berdasarkan hasil olahan data pemenang pelelangan *e-procurement* di LPSE Riau adapun 6 perusahaan UMKM yang menjadi pemenang pelelangan baik dalam pengadaan barang, pengadaan konstruksi, dan jasa konsultasi badan usaha di tahun 2011-2015 yang dijadikan responden pada penelitian ini.
- f. Pemerintah provinsi dalam hal ini ditangani oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau selaku pemegang kendali urusannya dalam koperasi maupun UMKM merasa terdukung dengan adanya inisiatif LPSE sebagai wadah untuk memberikan pekerjaan melalui pelelangan pengadaan barang/jasa secara konvensional maupun *e-procurement* dan juga dibantu dengan Asosiasi UMKM yang mendorong terwujudnya UMKM yang mampu mengembangkan usahanya.

B. Analisis Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis dan hasil untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab pendahuluan terkait dengan upaya yang dilakukan UMKM Lokal dalam *e-procurement* di Provinsi Riau pada tahun 2011-2015 dan sebagaimana pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat mempengaruhi upaya UMKM terutama yang berada di lokal khususnya pada Provinsi Riau agar mampu meningkatkan daya saing dengan adanya teknologi. Hal yang menjadi cara utama dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasi jenis dan nilai pelelangan yang dilakukan UMKM yang dibagi menjadi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan nilai biaya yang dikerjakan.

Jika diklasifikasikan berdasarkan jumlah pelelangan yang telah dilakukan perusahaan UMKM pada tahun 2011-2015 ini. Secara *e-procurement* total keseluruhan dari jumlah paket lelang tersebut sejumlah 3649 paket lelang di tahun 2011-2015. Berdasarkan temuan yang diketahui oleh penulis selama bulan Mei-Juli tahun 2016, 12 kabupaten/kota yang berada pada Provinsi Riau hanya terdapat 6 Kabupaten diantara 12 Kabupaten yang dominan mengikuti pelelangan di LPSE Provinsi Riau secara rutin hal ini ditunjukkan juga berdasarkan tingkat jumlah unit UMKM terbanyak di Provinsi Riau (Dinas Koperasi, 2013). Ke enam kabupaten/kota di Provinsi Riau yang menduduki jumlah UMKM terbanyak sampai pada tahun 2015 ini diantaranya adalah (Dinas Koperasi, 2013) :

**Tabel 3.2.1 Rasio Kabupaten/Kota yang menduduki unit UMKM
Tertinggi di Provinsi Riau Tahun 2015**

No	Daerah	Jumlah UMKM
1	Kota Pekanbaru	95.863
2	Indragiri Hilir	56.167
3	Kampar	54.853
4	Bengkalis	48.082
5	Dumai	46.678
6	Rokan Hulu	37.089

Maka oleh sebab itu berdasarkan data yang sudah ada, penulis melakukan sampling secara acak disetiap jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi badan usaha dan jasa lainnya yang berasal dari Perusahaan UMKM lokal di Provinsi Riau yang akan menjadi responden (data terlampir). Mustofa selaku pengurus dari Asosiasi UMKM di Provinsi Riau ini mengatakan bahwa :

“...UMKM pada bidang Pengadaan Barang dan Jasa itu hanya sekitar 30% saja kedudukannya jika dibanding pada sektor pertanian sekitar hampir 45%, dan sisanya ya untuk perdagangan dan Industri. Karena riau ini kan lebih kepada banyaknya bidang terkait dengan area perkebunan dan perhutanan...”

Berdasarkan dengan analisis sampling yang telah dilakukan adapun hasil yang didapat untuk menentukan jumlah responden yang akan diwawancarai yaitu 6 sampling secara acak diambil dan di klasifikasikan kembali berdasarkan UMKM yang menang beberapa kali di LPSE Provinsi Riau pada tahun 2011-

2015. Beberapa nama Kabupaten/Kota beserta UMKM yang berturut-turut mengikuti *e-procurement* pada tahun 2011-2015 dan menjadi responden pada penelitian ini diantaranya adalah :

Tabel 3.2.2 Daftar UMKM yang Mengikuti pelelangan berturut-turut pada tahun 2011-2015

No	Kab/Kota	UMKM	Kisaran Nilai Pekerjaan	Tahun Pemenangan	Keterangan
1	Indragiri Hilir	CV Aditya Ramadhan	Rp.300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2013,2014,2015	Pekerjaan Konstruksi
2	Kampar	CV Surya Gemilang Sejati	Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2012,2013,2014,2015	Pengadaan Barang
3	Kabupaten Bengkalis	CV Kurnia Jaya Abadi	Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2013 ,2015	Pengadaan Barang
4	Kota Pekanbaru	CV Rena Wijaya	Rp.300 juta	2012,2014,2015	Jasa Konsultasi Badan Usaha
5	Rokan Hulu	CV Rokan Hulu	Rp.300 juta	2012,2013,2014,2015	Pekerjaan Konstruksi
6	Dumai	CV Bahari Riau Pesisir	Rp. 300 juta - Rp. 2,5 Milyar	2011,2013	Pengadaan Barang

*Data Terlampir pada Lampiran

Pada jumlah responden yang akan diwawancarai yaitu dalam jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi. Pada data yang ada pada olah data pemenang *e-procurement* di LPSE Provinsi Riau pada tahun 2011-2015, nilai pekerjaan yang ada pada jenis jasa lainnya sudah masuk dalam kategori Usaha Menengah atas atau dapat dikatakan sebagai Usaha Besar. Maka

dari itu penulis hanya mengambil jenis pengadaan dalam usaha mikro dan menengah saja untuk menentukan daya saing dari UMKM yang mempunyai nilai pekerjaan kecil.

Isi dari bab lima ini sendiri terdiri dari 4 sub bab yang menjelaskan tentang dimensi atau pengaruh daya saing dari UMKM di Provinsi Riau. Pertama, terkait dengan pengaruh biaya dalam keikutsertaan UMKM pada durasi waktu 2011-2015. Kedua, penjelasan terkait dengan seperti apa untuk mengukur kualitas penyedia barang yang telah mengikuti pelelangan pada paket lelang baik berupa pengadaan barang, jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Lalu pada sub bab ketiga menjelaskan bagaimana waktu dalam ketepatan waktu pekerjaan dan hal yang berkaitan dengan produksi. Keempat, fleksibilitas yang di gunakan atau diterapkan oleh UMKM dalam mengikuti pelelangan yang diadakan oleh LPSE Provinsi Riau sebagaimana diketahui bahwa penyedia barang tersebut harus menyesuaikan dengan kepentingan lingkungan disekitar, dalam proses pelaksanaan pekerjaan. Keempat sub bab tersebut didapat dan diolah melalui hasil wawancara dan komparasi dengan data pendukung lainnya yang digunakan pada penelitian ini. Dengan kata lain bahwasannya UMKM di Provinsi Riau sudah menerapkan dan menggunakan layanan *e-procurement* ini secara baik dengan diwujudkannya keikutsertaan UMKM tersebut pada *e-procurement*.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai bagian dari bentuk usaha di Indonesia memang sudah seharusnya mampu memanfaatkan teknologi informasi demi kemajuan usaha yang dimiliki setiap UMKM (Nuryanti, 2013). Setiap pebisnis lokal maupun internasional tentunya mempunyai standarisasi

dalam pengukuran daya saing pada setiap usaha yang dimiliki. Ada pun tantangan yang harus dihadapi oleh setiap UMKM yaitu mampu mengoperasionalkan penggunaan teknologi informasi karena dapat mengambil maupun mengolah manfaat yang ada pada penggunaan teknologi tersebut. Dengan adanya kapabilitas utama dan dukungan penting dalam setiap usaha yang dilakukan oleh UMKM melalui adanya teknologi informasi yaitu (Indrajit, 2001) :

- a. Meningkatkan Produktivitas
- b. Mengurangi Biaya
- c. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- d. Meningkatkan relasi dengan pelanggan/konsumen
- e. Membangun aplikasi-aplikasi strategi baru

Jika dilihat berdasarkan visi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau yang mempunyai target untuk dapat menjadikan Koperasi dan UMKM Provinsi Riau mempunyai daya saing baik pada tingkat lokal maupun nasional. Hal tersebut didukung oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau dalam usahanya memberdayakan Koperasi dan UMKM di Provinsi Riau yang berkualitas dengan dibuatkannya Asosiasi UMKM di Provinsi Riau (Husein, 2016).

Hal ini diakui mempunyai peningkatan yang baik bahwasannya masyarakat telah siap dengan adanya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah dalam hal nya terkait dengan *e-procurement*. Dengan penggunaan teknologi informasi ini mendapatkan dampak baiknya untuk kemajuan dan daya saing

UMKM di Provinsi Riau khususnya terkait dengan adanya *e-procurement*. Akan tetapi dalam penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi temuan menarik yang didapat berdasarkan data paket lelang melalui *e-procurement* di website LPSE Provinsi Riau yang diantaranya ditemui beberapa jenis pengadaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa berasal dari UMKM yakni dalam setiap tahunnya di tahun 2011-2015 ada beberapa unit UMKM lokal menjadi pemenang dari paket lelang yang diadakan (Riau, 2016).

Hal tersebut sebagai pembuktian bahwa upaya maupun tindakan yang dilakukan oleh UMKM Lokal di Provinsi Riau ini mempunyai keterlibatan dalam tender yang diadakan oleh LPSE Provinsi Riau. Hal ini juga akan mendukung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tersebut untuk mensejahterakan kehidupan mereka maupun meningkatkan taraf kehidupan mereka. Nilai pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang berasal dari UMKM Lokal ini sendiri mencapai < Rp. 300 Juta – Rp. 50 Milyar. Nilai pekerjaan yang berada di atas Rp. 50 Milyar sudah menjadi sub pekerjaan yang dilakukan oleh Usaha besar.

UMKM Lokal tersebut harus mampu berdaya saing karena ini akan menjadi inti dari kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan maupun lembaga yang didalamnya mempunyai dua sisi yaitu sisi kesuksesan karena mendorong perusahaan-perusahaan dan swakelola untuk lebih dinamis dan bersaing dalam menghasilkan produk serta memberikan layanan kualitas yang terbaik bagi pasar atau masyarakat untuk daerah itu sendiri, sehingga persaingan tersebut dianggap sebagai peluang yang memotivasi (Porter M. E., 2007). Sedangkan disisi lainnya daya saing merupakan suatu kegagalan karena akan memperlemah perusahaan

atau lembaga yang bersifat statis, takut akan persaingan dan tidak mampu untuk dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas sehingga persaingan bukan dijadikan sebagai peluang tetapi menjadi ancaman baginya (Porter, 2013).

Daya saing atau tantangan didapat dari setiap sudut manapun. Tetapi yang menjadi menarik lainnya adalah, apakah masyarakat local khususnya penyedia barang/jasa berasal dari UMKM mempunyai upaya yang tinggi untuk dapat berperan aktif, tidak berjalan statis dalam pelelangan yang diadakan oleh LPSE Provinsi Riau. Meskipun memang pada kenyataannya hal ini kembali lagi dilihat oleh kualitas maupun kuantitas yang ada untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan tersebut dalam pencapaian usaha pemenuhan daya saing.

Secara garis besar peningkatan yang terjadi pada 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau setiap tahunnya mengalami kenaikan 2,9% jumlah UMKM di Provinsi Riau yang diantaranya mencakup Usaha Perdagangan, Pertanian, Perindustrian dan juga Pengadaan Barang dan Layanan Jasa (Mustofa, 2016). Meskipun dari 3649 paket lelang yang telah dilaksanakan pada tahun 2011-2015 ini hanya 1551 UMKM berasal dari provinsi riau yang mengikuti pelelangan tersebut, 1786 perusahaan diantaranya memegang kendali atas nilai pekerjaan diatas Rp. 50 Milyar atau dikategorikan sebagai nilai pekerjaan bagi penyedia barang/jasa dalam Usaha Besar, dan 444 unit paket pelelangan dikerjakan oleh UMKM dan Perusahaan yang berasal dari luar Provinsi Riau (Riau, 2016).

Tabel 3.2.3 Klasifikasi UMKM, Perusahaan dan UMKM Serta Perusahaan Yang berada di luar Provinsi Riau dalam E-Procurement Tahun 2011-2015

No	Jenis Paket Lelang	Jumlah Lelang Keseluruhan	UMKM (Nilai Pekerjaan Rp.300 juta- Rp. 50 Milyar)	Perusahaan (Rp. 50 Milyar - 100 Milyar)	UMKM dan Perusahaan diluar Provinsi Riau
1	Pengadaan Barang	1229	654	465	110
2	Pekerjaan Konstruksi	1610	659	749	202
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	558	106	380	72
4	Jasa Lainnya	252	132	192	60
Total		3649	1551	1786	444

*Sumber Data Hasil Olahan Data Melalui Website LPSE Provinsi Riau

Tabel 3.2.4 Persentase UMKM di Provinsi Riau, Perusahaan di Provinsi Riau dan UMKM serta Perusahaan Yang Berada di Luar Provinsi Riau Tahun 2011-2015

No	Jenis Paket Lelang	Jumlah Lelang di LPSE Provinsi Riau Keseluruhan	Jumlah Persentase UMKM di Provinsi Riau %	Jumlah persentase Perusahaan di Provinsi Riau %	UMKM dan Perusahaan diluar Provinsi Riau %
1	Pengadaan Barang	1229	53%	38%	9%
2	Pekerjaan Konstruksi	1610	41%	47%	13%
3	Jasa Konsultansi Badan Usaha	558	19%	68%	13%
4	Jasa Lainnya	252	52%	76%	24%
Total		3649	43%	49%	12%

* Sumber Data Hasil Olahan Data Melalui Website LPSE Provinsi Riau

Dengan adanya hasil tersebut dinyatakan bahwa daya saing UMKM di Provinsi Riau lebih tinggi dengan UMKM maupun Perusahaan yang berasal dari luar Provinsi Riau. Meskipun pada kenyataannya memang tingkat daya saing perusahaan di daerah juga menjadi penyedia barang/jasa utama dalam hal ini karena menduduki peringkat pertama dalam pekerjaan paket lelang yang disediakan. Karena memang jumlah nilai pekerjaan yang disediakan berbagai macam klasifikasi nilai. Nilai pekerjaan yang dilakukan UMKM di Provinsi Riau pada pelelangan melalui *e-procurement* ini diantaranya berkisar Rp. 50 juta sampai dengan 100 Milyar (Raja, 2016). Hal tersebut disesuaikan dengan UU No 20 tahun 2008.

Pada kenyataannya pemerintah dalam halnya pemerintah provinsi dan daerah itu sendiri tidak secara langsung menangani pekerjaan pengadaan itu dengan sendirinya, meskipun memang pada dasarnya sudah ada swakelola yang menangani hal tersebut. Tetapi pekerjaan pengadaan barang dan jasa ini hampir selalu menggunakan pihak swasta (Raja, 2016). Jika dilihat pada segi keamanan, sistem pengadaan secara elektronik yang dikelola LPSE sudah baik. Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka oleh sembarang orang, karena menggunakan sistem enkripsi dan deskripsi dari Lembaga Sandi Negara sehingga para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran yang mereka upload.

Beberapa faktor keuntungan dengan menggunakan pelayanan maupun jasa dari UMKM ini tidak lain, bukan hanya pendapatan daerah yang meningkat tetapi

juga mampu meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang ada di provinsi riau. Husein mengatakan bahwasannya :

“..... sebenarnya sudah cukup baik ya masyarakat kita sudah diberdayakan, ya setidaknya mengurangi kemiskinan dan pengangguran lah jadinya bukan hanya mereka saja yang diuntungkan tetapi pemerintah juga ikut diuntungkanlah ya dalam hal ini.....”

Dengan adanya teknologi sekarang mampu peningkatan jumlah unit UMKM yang ada di Provinsi Riau karena merasa dapat terfasilitasi serta mendapat akses komunikasi yang mudah (Drs. Asril, 2013). Ada salah satu daerah yang mempunyai peningkatan dalam kuantitas UMKM baik dalam sektor perdagangan, industri, pertanian maupun pelayanan dan jasa. Peningkatan dari jumlah unit UMKM pada tahun 2014 yaitu berasal dari Kabupaten/Kota diantaranya adalah Bengkalis, Kuantan Singingi, dan Dumai. Pada awal tahun 2015 jumlah unit UMKM di Provinsi Riau mencapai rata-rata 550.003 unit UMKM (Husein, 2016). Daerah yang paling banyak menyumbang unit UMKM di Provinsi Riau berasal dari Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru (Tabel 3.2.2) meskipun memang Kota Pekanbaru didorong dengan kecanggihan teknologi dan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan daerah yang lainnya, berbeda dari daerah lain terkait dengan akses internet yang cukup baik.

Memang pada hasilnya pencapaian peningkatan yang pesat pada tahun 2013 untuk mampu meningkatkan jumlah unit UMKM di daerah Kabupaten Indragiri Hulu maupun di tingkat Provinsi Riau mampu mendorong tingkat pendapatan daerah itu sendiri. Hal ini terus didorong oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau agar terus mampu mensukseskan visi misi yang diterapkan

tersebut. Beberapa unsur yang terlibat pada penelitian ini dalam pengaruh daya saing setiap UMKM ini yaitu baik dalam segi Biaya, Kualitas, Waktu maupun Fleksibilitas.

1. Pengaruh Biaya Dalam Keikutsertaan UMKM

Meskipun memang pada kenyataannya dimensi biaya ini tidak hanya mencakup tentang biaya produksi saja, tetapi produktifitas tenaga kerja, penggunaan kapasitas produksi dan persediaaannya ikut andil dalam penggunaannya. Pengaruh biaya ini adalah kekuatan mutlak yang digunakan sebagai modal utama yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan yang memang didalamnya tentu mencakup pembiayaan produksi, produktifitas tenaga kerjanya, pemanfaatan kapasitas produksi perusahaan dan adanya cadangan produksi yang digunakan sebagai persediaan yang sewaktu dapat digunakan oleh perusahaan untuk menunjang kualitas maupun kuantitas suatu perusahaan tersebut (Mustofa, 2016).

Tidak hanya penggunaan produksi dan keperluan internalnya saja tetapi didalamnya mencakup bagaimana nilai pekerjaan tersebut dapat disesuaikan dengan kapasitas perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut. Besaran yang dikelola oleh UMKM ini sendiri senilai kurang dari Rp. 2,5 Milyar. Hal ini sebagai pembeda antara perusahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang akan menjadi pembeda dari nilai pelaksanaan pekerjaan tersebut (Raja, 2016).

Peran UMKM juga ikut terlibat dan partisipatif mengikuti *e-procurement* di LPSE Provinsi Riau. Meskipun memang pada kenyataannya, penggunaan *e-procurement* ini belum maksimal di Provinsi Riau tetapi sudah dapat menggunakannya dengan baik. Hal ini didukung dengan adanya data yang didapat dari dinas koperasi dan asosiasi UMKM yang bahwasannya dari data tersebut menunjukkan peningkatan kuantitas pada UMKM di Provinsi Riau (Tabel 3.2.1) (Mustofa, 2016).

Sebenarnya yang nantinya jika upaya ini didukung oleh pemerintah akan dapat membantu pemerintah daerah itu sendiri dalam pencapaian tingkat pendapatan daerah dan banyak pihak yang dapat diuntungkan dari upaya peningkatan daya saing UMKM terhadap *e-procurement* di Provinsi Riau karena tidak hanya satu pihak saja yang diuntungkan, tetapi beberapa pihak ikut berperan. Adapun pengaruh biaya ini juga menjadi faktor penghambat sebelum adanya kebijakan terkait dengan *e-procurement*, adanya penghambat tersebut berasal dari segi internal yang masih terjadi di beberapa UMKM di Provinsi Riau diantaranya adalah (Mustofa, 2016) :

1. Kesulitan akan akses biaya, diantaranya adalah jumlah pembiayaan yang diperlukan.
2. Pelaku UMKM ini masih kesulitan dalam mendapatkan KUR daerah.

Hal ini yang masih menjadi problematika dari beberapa unit UMKM yang tersebar di Provinsi Riau, meskipun pemerintah sudah berupaya dalam pemenuhan legalitas setiap UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Riau

juga dibantu oleh Asosiasi UMKM dalam penanganan masalah maupun suatu program yang dihadapi oleh setiap UMKM. Intensitas persaingan itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya dalam struktur biaya produksi (Porter, 2013). Sebagai contoh, jika memiliki porsi biaya struktur yang cukup besar, maka semakin tinggi intensitas persaingan yang disebabkan oleh tingkat yang cukup tinggi. Maka pada umumnya produksi dalam pengadaan tersebut harus menjual atau menyediakan produk dalam jumlah yang besar.

2. Pengaruh Dimensi Waktu Yang Diikuti UMKM Pada *E-Procurement*

Dimensi ini menjelaskan bagaimana UMKM dapat mengikuti pelelangan yang di lakukan oleh LPSE Provinsi Riau. Indikator penilaian pada dimensi waktu itu sendiri yaitu terkait dengan (Kotler, 2003) :

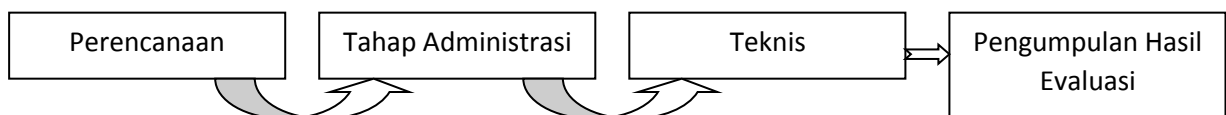
- a. Ketepatan waktu produksi
- b. Pengurangan waktu tunggu produksi
- c. Pengurangan wakt tunggu produksi
- d. Ketepatan waktu penyampaian produksi

Hal tersebut dilihat oleh (Mustofa, 2016) sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pekerjaan yang dapat dinilai dari ketepatan waktu. Pengaruh waktu ini menjadi salah satu cara menjalin hubungan yang baik dengan konsumen yang mudah, karena bahwasannya dapat menentukan waktu pekerjaan yang akan dilaksanakan tentu berkaitan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pelaksana pekerjaan tersebut dan konsumen. Seperti yang dikatakan oleh (Mustofa, 2016) bahwasannya :

“konsumen ialah raja. Ini slogan yang harus dipegang oleh para pekerja ya gunanya ya untuk menjaga kelangsungan suatu usaha. Konsumen kan hanya membutuhkan produk dan kami-kami ini sebagai pekerja atau pengusaha lah dikatakan membutuhkan konsumen. Makanya simbiosis mutualisme disini itu memang saya tekankan agar nanti orang tidak salah-salah untuk pilih. Kuncinya ya menjalin hubungan ya. Kalau saatnya laporan ya laporan. Konsumen pun akan senang jika pekerjaan ini cepat selesai sesuai dengan perjanjian awal. Waktu itu ya salah satu capaian untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Ya intinya jika kita menyelesaikan waktu secara cepat ya maka lah kita sukses dalam berbisnis”

Didalam enam responden UMKM ini tidak mengalami kesulitan yang berarti, maksudnya adalah UMKM ini dapat mengikuti perjanjian atau pun syarat-syarat yang ditentukan oleh LPSE (penyedia pekerjaan) , waktu yang ditentukan oleh LPSE Provinsi Riau dalam melakukan pelelangan secara elektronik sudah sesuai prosedur dan tidak adanya posisi kondisional (Imam, 2016). Waktu yang terjadi pada proses tersebut diantaranya yaitu (Raja, 2016) :

Bagan 3.1 Proses Yang Dibutuhkan dalam Proses Pelaksanaan Pekerjaan *E-Procurement*



Sumber : diolah melalui hasil wawancara dengan Verifikator LPSE Provinsi Riau, 2016.

Pada proses tersebut sudah ada ketentuan dan aturan yang digunakan oleh pihak penyedia pekerjaan yang memudahkan UMKM ini mengikuti pelelangan yang disediakan. LPSE Provinsi Riau ini juga mengikuti ketentuan dan alur yang berdasarkan pada Perka LKPP No 1 tentang *e-tendering* (Imam, 2016). Didalam Perka tersebut dijelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa juga merupakan bagian dari *e-tendering*.

Didalam Perka LKPP telah disebutkan bahwa waktu pada pelaksanaan *e-procurement* ini disesuaikan dengan hari kerja atau hari kalender. Pelaku jenis UMKM ini berbeda dari kantor pekerjaan lainnya yang dilakukan secara formal mulai dari senin-sabtu. Berbeda dengan itu, UMKM ini dapat mengikuti *e-procurement* ini kapan saja dan dimana saja dengan didukung fasilitas internet yang memadai (Imam, 2016). Maka dengan adanya hal seperti ini juga memudahkan para pelaku khususnya UMKM untuk berpartisipasi pada penyediaan barang dan jasa yang dilakukan LPSE melalui *e-procurement* (Husein, 2016). Dampak positif yang muncul pada *e-procurement* ini akan menghemat waktu yang diperlukan untuk mengikuti *e-procurement* yang tentunya dapat dilihat dari efisiensi biaya yang digunakan.

Sebagaimana ketentuan tersebut dapat memangkas waktu yang hanya digunakan 21 hari untuk proses *e-procurement* tersebut. kesimpulannya adalah waktu yang disediakan dengan cara elektronik lebih cepat dibandingkan dengan cara konvensional (Raja, 2016). Adapun waktu yang digunakan dalam mengikuti *e-procurement* ini adalah (Raja, 2016) :

1. Pelaksanaan lelang oleh LPSE Provinsi Riau
2. Paket pekerjaan yang diumumkan berdasarkan ketetapan yang sudah dilakukan satuan kerja yang akan dilelang dan dilaksanakan secara *e-procurement*.
3. Lalu paket pekerjaan tersebut diumumkan oleh masing-masing unit satuan kerja.

4. Penyedia usaha tersebut melakukan registrasi pada portal *e-procurement* LPSE dengan menyediakan alamat email dan NPWP perusahaan dari penyedia usaha tersebut yang sudah dimasukkan dan memberi password.
5. Penyedia usaha tersebut memahami peraturan yang ada terlebih dahulu, lalu penyedia usaha tersebut memilih paket pekerjaan yang tersedia pada pelelangan sesuai dengan kualifikasi yang dimilikinya.
6. Pembukaan dokumen penawaran hanya dapat dibuka oleh Panitia Lelang masing-masing unit satuan kerja sesuai *setting* waktu. Pembukaan sampul disitus *e-procurement* yang selanjutnya mengadakan evaluasi untuk menentukan pemenang lelang.
7. Seluruh peserta lelang dan masyarakat dapat melihat hasil evaluasi atas penawaran yang telah dilakukan pada portal e-procurement tersebut.

Menurut (Juli, 2016) waktu itu sangat menentukan suatu pekerjaan itu sukses atau tidak karena akan mengukur bagaimana ketepatan pekerjaan itu dilakukan, pertanggung jawaban yang dilakukan yaitu dengan konsumen. Sebagai UMKM tentunya orientasi berada pada keuntungan yang akan didapat dari pekerjaan tersebut. Konsumen akan merasa percaya jika dalam proses pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan perjanjian/kontrak yang sudah disepakati antara pihak penyedia pekerjaan dan penyedia barang. Pihak verifikator LPSE Provinsi Riau ini mengatakan bahwa dimensi waktu ini mempengaruhi aspek biaya, jika waktu yang sudah ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati maka akan mempengaruhi jumlah anggaran dan proses

pekerjaan tersebut (Raja, 2016). Tidak hanya pihak penyedia dan pelaksana saja yang akan dirugikan tetapi pekerjaan lainnya yang akan dijalankan juga akan mengalami dampaknya jika dimensi waktu ini tidak diperhitungkan dengan tepat (Juli, 2016).

3. Pengaruh Dimensi Kualitas Bagi UMKM Dalam Mengikuti *E-Procurement*

Menurut (Juli, 2016) sebagai salah satu pekerja di UMKM Kabupaten Indragiri hilir mengatakan bahwa :

“tentunya setiap perusahaan itu mengutamakan kualitas dulu baru kuantitas. Volumennya akan naik jika kualitas tersebut dapat mendukung keberlangsungan dari UMKM di Indragiri hilir, tapi memang di Indragiri hilir ini UMKM yang ada tidak begitu signifikan dalam keberlangsungannya seperti pada daerah-daerah lainnya. Adapun daerah yang mempunyai signifikansi yang cukup baik itu di daerah dumai, pelepasan dan duri meskipun ketiga daerah tersebut mendominasi pada jenis perdagangan secara konvensional. Sebetulnya setiap UMKM juga masih dan harus diberi suatu pelatihan Entrepreneurship agar dapat lebih maju lagi dan memunculkan rasa percaya diri yang tinggi meskipun hanya sebagai pengusaha kecil atau pemula di dalam bidang bisnis apapun, dan yakin suatu saat nanti perusahaannya akan tumbuh menjadi besar”

Berbeda dengan (Adzar, 2016) yang mengatakan bahwa :

“ UMKM akan dianggap dapat bertanggungjawab secara professional jika kualitas yang disediakan sudah tercapai. Maksudnya kan UMKM pasti bersaing juga dengan Usaha Besar kan. Jadi ya asal UMKM itu punya kualitas yang bagus sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen ya UMKM itu artinya bisa bersaing. Karna jaman sekarang udah susah kalau kita gak bisa terus maju, terus memperbaiki kekurangan kita. Bukan hanya produk yang ditingkatkan kualitasnya tapi ya para pekerjanya juga ditingkatkan lah”

Adapun (Astamoen, 2005) juga mengatakan bahwasannya :

“ kualitas yang dimiliki oleh setiap UMKM di Riau ini juga mendorong terciptanya wawasan yang memadai dalam berbagai hal terutama pada bidang bisnis. Sudah disediakan Klinik UMKM ya kita ini sebagai pemilik UMKM harus mampu mengembangkan kemampuan kita lah, jangan hanya berfikir secara tradisional saja tetapi secara modern juga harus ditingkatkan. Contohnya ini, CV Aditya Ramadhan menang dalam 3 tahun untuk mengerjakan pekerjaan

pekerjaan konstruksi. Ya artinya pemberi pekerjaan merasa puas dengan pekerjaan dari CV ini. Tidak mungkin kan kalau pekerjaannya jelek tetap dipakai. Ya gak mungkin. Kita berbicara kepuasan artinya jika melihat kualitas dan dapat dikatakan bahwa pemberi pekerjaan tersebut puas pada pekerjaan yang sudah kami selesaikan”

Maka dari ketiga hasil wawancara tersebut dapat memberikan gambaran bahwa UMKM ini digunakan dengan kualitas yang sudah ditentukan oleh pihak penyedia pekerjaan barang/jasa. Kualitas tersebut mempengaruhi kepuasan konsumen, yang yaitu penyedia pekerjaan tersebut. kualitas ini bersifat menyeluruh, baik produk maupun prosesnya. Maka hal tersebut memunculkan kreatifitas dan inovatif agar usaha yang dimiliki selalu bisa berdaya saing, karena kembali lagi jika kita berbicara terkait dengan bisnis maka temannya adalah kompetisi, kualitas merupakan kunci utama dari adanya daya saing apalagi jika berbicara terkait dengan bisnis (Juli, 2016).

Adapun beberapa aspek yang perlu dipahami untuk dapat mengukur kualitas yang mempengaruhi daya saing yakni diantaranya dengan (Porter M. , 2013) :

1. Adanya tampilan produk suatu perusahaan
2. Jangka waktu penerimaan dan pelaksanaan produk
3. daya tahan ataupun ketahanan dari produk tersebut yang dapat diukur dari umur ekonomis penggunaan produk.

Paling utama pada kualitas suatu pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang yaitu pada dua hal diantaranya adalah kecepatan penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang diharapkan oleh pemberi pekerjaan.

Mustofa menjelaskan bahwa poin besar dalam menilai kualitas dari suatu Badan Usaha/Penyedia Barang/Jasa tersebut dapat diketahui terlebih dahulu dalam kualifikasi yang ditentukan (Mustofa, 2016):

“Untuk menentukan kualitas yang utama yaitu pada kualifikasinya, memenuhi syarat atau tidak. Itu sudah ada standar dokumennya, kalau satu poin dari daftar kualifikasi saja belum bisa dipenuhi tandanya hal tersebut belum mencapai kualitas yang dibutuhkan. Karna dari setiap poin-poin kualifikasi tentunya mempunyai penilaian tersendiri. Dan kualifikasi tersebut juga melibatkan beberapa pihak diantaranya perpajakan, perizinan dan Bank, tidak hanya LPSE saja yang memegang kendali atas hal ini. Maka itu mempermudah pihak penyedia pekerjaan pengadaan barang/jasa ini karena dalam kaitannya hal ini sudah diatur dari mulai diketahuinya track record penyedia barang/jasa tersebut diawali pada pekerjaan terdahulu yang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa tersebut, lalu surat-surat perizinan dan juga surat keterangan dukungan keuangan dari Bank berupa dokumen yang asli ini sudah diatur. Jadi sudah jelas standarisasi dari pelelangan ini bagaimana dan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini dalam mengikuti pekerjaan pengadaan barang/jasa di Provinsi Riau. Asosisasi ini juga membantu setiap UMKM untuk dapat istilahnya menghidupkan Usahanya lah dengan memberikan wadah kayak Klinik UMKM dan juga Klinik UKM.....”

Pada *e-procurement* di LPSE Provinsi Riau, dalam mengukur suatu kualitas pekerjaan tersebut yang utama dilihat sebelum memulai yaitu pada penawaran. Artinya hasil dari pemenang pekerjaan *e-procurement* ini sudah diakui secara administrasi, teknis dan harga yang ditawarkan (Raja, 2016). Jadi kualitas dari pemenang tender *e-procurement* sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut PPK menilai secara teknis untuk menilai kualifikasi yang dimiliki berdasarkan syarat yang telah disampaikan pada awal proses *e-tendering* dimulai. Jika suatu pelaku usaha tidak dapat dikatakan mempunyai kualifikasi, tentunya sudah masuk dalam proses evaluasi dan mempunyai *track record* yang kurang baik, hal ini masuk dalam proses seleksi penyedia barang pada LPSE Provinsi

Riau. Saat dikatakan penyedia barang tersebut tidak berkualitas atau telat melakukan kesalahan pada pekerjaan sebelumnya akan masuk dalam daftar hitam yang disediakan oleh LPSE yang terintegrasi pada sistem di LKPP (Raja, 2016).

Munculnya penghambat lainnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ini pada kemampuan dan kapasitas yang dimiliki oleh setiap karyawan. Karena sebenarnya dengan adanya *e-procurement* yang sudah mempunyai standarisasi tersendiri dan tentunya jika perusahaan itu tidak memiliki karyawan yang berkapasitas baik maka akan merugikan perusahaan itu sendiri. Jadi karyawan juga perlu adanya *upgrade* diri agar terus menyesuaikan perkembangan zaman yang ada (Imam, 2016).

Berdasarkan data pada olah data yang ada di LPSE Provinsi Riau (Tabel 3.2.6), ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pemerintah dalam menggunakan penyedia barang/jasa berasal dari unit UMKM mengalami kepuasan yang artinya melakukan kerjasama dengan jenis pengadaan yang sama pada UMKM yang sama. Kepuasan disini bahwasannya penyedia barang/jasa tersebut mampu untuk meningkatkan mutu pelayanan yang dicari, diminati dan diterima atau tidak di terima pelanggan yang akhirnya disini pemerintah merasa puas dan terus melakukan kerjasama (Kotler, 2003).

Tabel 3.2.5 Daftar UMKM sebagai Penyedia Barang/Jasa melalui *E-Procurement* Tahun 2011-2015

Daerah	Nama Pemenang	Nama Lelang	Jenis	Instansi	Satker	Pagu	HPS	Tahun	Harga Penawaran	Jumlah Peserta
--------	---------------	-------------	-------	----------	--------	------	-----	-------	-----------------	----------------

Pekanbaru	CV. Rena Wijaya	Konsultan Manajemen (Infrastruktur Perdesaan Wilayah II Kota Pekanbaru, Kab. Siak, Kab. Kampar dan Kab. Rokan Hulu)	Jasa Konsultasi Badan Usaha	ZONK	Bidang Permukiman - Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Rp 112.150.000,00	Rp 112.150.000,00	2013	Rp 111.683.000,00	22
	CV. Rena Wijaya	Biaya Perencanaan Pembangunan Gedung STIE Purna Graha Pekanbaru	Jasa Konsultasi Badan Usaha	Provinsi Riau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	Rp 75.000.000,00	Rp 74.950.000,00	2014	Rp 65.670.000,00	49
	CV. Rena Wijaya	Identifikasi Kawasan Strategis di Kab. Rokan Hulu		Provinsi Riau	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI RIAU	Rp 125.000.000,00	Rp 124.960.000,00	2015	Rp 123.942.000,00	42
Rokan Hulu	CV. ROKAN HULU	Pembangunan Turap Pengaman Bangunan Workshop Listrik	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Riau	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Prov. Riau	Rp 244.588.000,00	Rp 244.584.900,00	2013	Rp 194.459.000,00	23
Daerah	Nama Pemenang	Nama Lelang	Jenis	Instansi	Satker	Pagu	HPS	Tahun	Harga Penawaran	Jumlah Peserta

	CV. ROKAN HULU	Pemeliharaan Jalan Rokan - Pendalihan - Dusun Batas	Pekerjaan Konstruksi	ZON K	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau	Rp 2.464.140.200,00	Rp 2.463.895.734,00	2013	Rp 2.182.634.813,00	23
	CV. ROKAN HULU	Semenisasi Jalan Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Riau	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau	Rp 1.037.000.000,00	Rp 1.037.000.000,00	2014	Rp 390.120.000,00	47
	CV. ROKAN HULU	Pembuatan Pagar SMAN Olahraga Provinsi Riau	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Riau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	Rp 1.550.000.000,00	Rp 1.201.770.000,00	2015	Rp 1.033.995.000,00	9
Kampar	CV.S URYA GEMILANG SEJATI	BELANJA BAHAN HABIS PAKAI METERIAL LABORATORIUM	Pengadaan Barang	Provinsi Riau	Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau	Rp 169.930.000,00	Rp 169.925.000,00	2012	Rp 167.992.175,00	50
Daerah	Nama Pemenang	Nama Lelang	Jenis	Instansi	Satker	Pagu	HPS	Tahun	Harga Penawaran	Jumlah Peserta

	CV.S URYA GEMI LANG SEJA TI	Pengadaa n Pompa Sentrifug al Dan Kelengka pannya Tahun Anggara n 2013	Penga daan Baran g	ZON K	Dinas Tanama n Pangan dan Holtikul tura Provinsi Riau	Rp 770.0 00.00 0,00	Rp 769. 634. 250, 00	2013	Rp 692.060 .000,00	19
	CV.S URYA GEMI LANG SEJA TI	Pengadaa n Bibit Ternak Sapi Budidaya MP3KI Kabupaten Kuantan Singingi	Penga daan Barang	Provi nsi Riau	Dinas Pertanian dan Peternak an Provinsi Riau	Rp 300.00 0.000, 00	Rp 299.8 54.00 0,00	2015	Rp 294.800. 000,00	40
	CV.S URYA GEMI LANG SEJA TI	Pengadaa n Nitrogen Cair (N2)	Penga daan Baran g	Prov insi Riau	DINAS PERTA NIAN DAN PETER NAKA N PROVI NSI RIAU	Rp 393.0 00.00 0,00	Rp 392. 312. 250, 00	2016	Rp 299.583 .900,00	23
Bengk alis	CV. KURN IA JAYA ABAD I	Pengadaa n Mobil Engkel Pengangk ut Benih Tahun Anggaran 2013	Penga daan Barang	Provi nsi Riau	Dinas Perikana n dan Kelautan Provinsi Riau	Rp 235.00 0.000, 00	Rp 234.4 80.00 0,00	2013	Rp 232.919. 060,00	18
Daerah	Nama Pemen ang	Nama Lelang	Jenis	Inst ansi	Satker	Pagu	HPS	Tahun	Harga Penawa ran	Jumlah Peserta

	CV. KURNIA JAYA ABADI	Pengadaan Bibit Karet, Pupuk NPK dan Pestisida di Kabupaten Bengkalis (P)	Pengadaan Barang	Provinsi Riau	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	Rp 1.445.000,00	Rp 526.565.243,00	2014	Rp 525.320.000,00	57
	CV. ADITYA RAMADAHAN	Pembangunan Gedung STAI AULIARAS SYIDIN Tembilahan	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Riau	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau	Rp 682.500.000,00	Rp 682.230.000,00	2013	Rp 667.240.000,00	47
	CV. ADITYA RAMADAHAN	Semenisasi Jalan Desa Kesumbo Ampai Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Riau	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau	Rp 1.037.000.000,00	Rp 1.037.000.000,00	2014	Rp 390.120.000,00	20
	CV. ADITYA RAMADAHAN	Pekerjaan Fisik Pembangunan Gedung Gaung Sepakat Dusun Pasar Baru Desa Simp. Gaung Kec. Gaung Indragiri Hilir	Pekerjaan Konstruksi	Provinsi Riau	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau	Rp 306.817.550,00	Rp 306.697.000,00	2015	Rp 297.377.000,00	47
Dumai	CV Bahari Riau Pesisir	Pengadaan Meubeuleir Museum	Pengadaan Barang	Provinsi Riau	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Riau	Rp 375.000.000,00	Rp 346.390.000,00	2012	Rp 323.822.000,00	15

	CV Bahari Riau Pesisir	Pengadaan Belanja Bahan Bangunan Sheding Net untuk sayur daun lebar Kegiatan Peningkatan Produksi dan Mutu Sayur-Sayuran Tahun 2013	Pengadaan Barang	ZONK	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	2013	Rp 588.200.000,00	
--	-------------------------------	---	------------------	------	---	---------------	---------------	-------------	-------------------	--

*Sumber Olah Data Pada Website LPSE Provinsi Riau

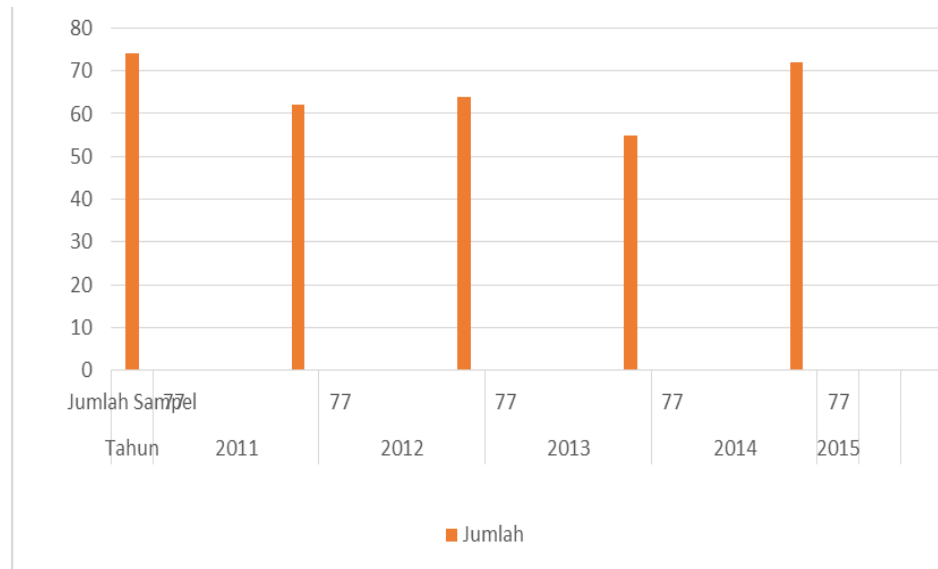
Dengan adanya data diatas maka dapat diketahui pola daya Saing UMKM di Provinsi Riau pada tahun 2011-2015 ini sebagai berikut :

Tabel 3.2.6 Jumlah Rasio UMKM yang mengikuti *e-procurement* Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah Sampel	Jenis Barang	Jumlah UMKM	Jumlah
2011	77	Pengadaan Barang	28	74
		Pekerjaan Konstruksi	33	
		Jasa Konsultansi Badan Usaha	8	
		Jasa Lainnya	5	
2012	77	Pengadaan Barang	22	62
		Pekerjaan Konstruksi	26	
		Jasa Konsultansi Badan Usaha	9	
		Jasa Lainnya	5	
2013	77	Pengadaan Barang	25	64
		Pekerjaan Konstruksi	25	
		Jasa Konsultansi Badan Usaha	9	
		Jasa Lainnya	5	
2014	77	Pengadaan Barang	27	55
		Pekerjaan Konstruksi	14	
		Jasa Konsultansi Badan Usaha	9	
		Jasa Lainnya	5	
2015	77	Pengadaan Barang	25	72
		Pekerjaan Konstruksi	33	
		Jasa Konsultansi Badan Usaha	9	
		Jasa Lainnya	5	
	385		327	327
Jumlah Usaha Besar			58	

Sumber : Hasil Olah Data pada Website LPSE Provinsi Riau

**Gambar 3.1 Grafik Rasio Ukuran Kepuasa LPSE Dengan UMKM Melalui
E-Procurement Tahun 2011-2015**



*Sumber :Hasil Sample Olah Data berdasarkan data yang tersedia pada LPSE Provinsi Riau

Maka dengan adanya pola tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasa pemberi pekerjaan barang/jasa kepada UMKM (LPSE Provinsi Riau) mempunyai siklus yang naik turun tetapi masih berada pada posisi lebih dari 50% penggunaan penyedia barang/jasa secara *e-procurement* melalui UMKM . Hal ini juga mendapat dampak dari penurunan jumlah UMKM yang berada di Provinsi Riau pada tahun 2013 (Tabel 3.1) (Raja, 2016).

4. Fleksibilitas Selama Pelaksanaan *e-procurement*

UMKM juga memiliki fleksibilitas usaha yang bagus jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas besar. Dahulu UMKM belumlah mendapat perhatian yang penuh dari pemerintah, tapi sekarang pemerintah sedang menggalakan program-program untuk peningkatan UMKM yang ada di Indonesia

serta memberikan perhatian khusus kepada UMKM tersebut (Nuryanti, 2013). Fleksibilitas yang dimaksud adalah bagaimana UMKM di Provinsi Riau dapat menyesuaikan diri dengan adanya kecepatan menyesuaikan dengan kepentingan lingkungan yang sedang terjadi.

Hal yang terjadi dalam fleksibilitas *e-procurement* yang ada akhirnya berada pada tingkat daya saing yang terjadi. Sebagai contoh, standar kualitas yang diberikan harus disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi pada lingkungan sekitar tempat pekerjaan itu dilakukan sehingga pihak pelaku usaha atau UMKM inilah yang mengikuti struktural kualifikasi dari pihak penyelenggara. Sektor UMKM dianggap lebih mudah dalam beradaptasi pada dinamika perubahan kondisi (Bandung, 2009). Hal ini juga harus didukung dengan kemampuan setiap penyedia barang dan jasa tersebut agar mampu menyesuaikan apa yang terjadi pada proses *e-procurement*.

Dengan adanya *e-procurement* ini telah menjalankan prinsip-prinsip *good government* yang diantaranya mencakup efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi. Jadi pelaksanaan *e-procurement* ini akan lebih mudah karena dapat dilakukan dimana saja. Pelaku asosiasi UMKM di Provinsi Riau mengungkapkan bahwa UMKM di Provinsi Riau sudah dapat dikatakan fleksibel dalam melaksanakan sistem *e-procurement* bahwasannya (Mustofa, 2016) :

“aturan yang dimiliki oleh UMKM berbeda halnya dengan usaha besar yang sudah dipatok banyak, selain menjadi aturan PT sebagai Perseroan Terbuka, pajak segala macem. Jadi dia kenapa kemudian

menjadi bantalan karena orang itu akhirnya lebih mudah. Mau pilih usaha apa saja banyak sebenarnya, tinggal dia mau, mau bekerja keras, ada mungkin punya akses sedikit keuangan mau uang dari keluarga, tabungan, dan sebagainya...”

Fleksibilitas inilah nantinya yang akan menyesuaikan dimensi lain untuk meningkatkan daya saing suatu UMKM, kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda. Fleksibilitas inilah yang nantinya akan membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai pandangan dan kualitas yang berbeda yang disesuaikan dengan suatu perubahan situasi (Raja, 2016).